

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah agenda pembangunan global yang telah disepakati oleh seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai tindak lanjut dari *Millennium Development Goals* (MDGs). Agenda ini dirancang untuk menanggulangi berbagai tantangan pembangunan, terutama masalah kemiskinan, melalui penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka SDGs, pengentasan kemiskinan diposisikan sebagai tujuan utama yang harus dicapai oleh setiap negara melalui kebijakan dan program yang terintegrasi (Jayanthi et al., 2024). Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi isu global yang bersifat multidimensi dan sulit diatasi, di mana lebih dari 1,3 miliar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan multidimensi, termasuk 558 juta anak-anak (Alkire et al., 2021).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga deprivasi pada aspek kesehatan, pendidikan, dan layanan dasar, sehingga SDG 1 (*No Poverty*) berfungsi sebagai fondasi bagi pencapaian tujuan SDGs lainnya (Leal Filho et al., 2021). Dalam konteks tersebut, SDGs menegaskan prinsip *leave no*

one behind, yakni memastikan bahwa kelompok masyarakat paling miskin dan rentan menjadi prioritas utama dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan (Mensah et al., 2022).

Sebagai bagian dari komitmen global tersebut, Indonesia mengadopsi agenda SDGs ke dalam kebijakan pembangunan nasional, termasuk dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan. Komitmen ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara (Murdiyana & Mulyana, 2017). Dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial nasional, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem jaring pengaman sosial yang dikembangkan untuk memberikan perlindungan kepada rumah tangga miskin dan rentan terhadap berbagai risiko sosial ekonomi melalui bantuan sosial bersyarat yang terhubung dengan layanan pendidikan dan kesehatan (Wahyudi et al., 2023). Dengan demikian, PKH diposisikan sebagai instrumen kebijakan sosial strategis yang diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan pertama, yaitu penghapusan kemiskinan (*No Poverty*).

Dalam perspektif Islam, upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan merupakan bagian

dari tanggung jawab sosial yang sangat ditekankan. Allah Swt. berfirman dalam Surah Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

"Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (QS. An-Nisa [4]: 9).

Ayat tersebut mengandung pesan agar setiap individu maupun pemangku kepentingan memiliki kepedulian terhadap kondisi generasi yang lemah dan rentan secara sosial maupun ekonomi. Kata *dzurriyyatan dhi'āfan* (keturunan yang lemah) tidak hanya dimaknai sebagai kelemahan fisik, tetapi juga dapat dipahami sebagai kondisi keterbatasan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan yang berpotensi menghambat kualitas hidup suatu generasi. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya berbagai upaya yang dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar tidak terjebak dalam lingkaran kemiskinan yang berkelanjutan. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya

tanggung jawab sosial dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut sejalan dengan tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu program perlindungan sosial yang dilaksanakan pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan. Melalui bantuan sosial bersyarat, PKH tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui akses yang lebih baik terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, implementasi PKH dapat dipahami sebagai upaya nyata dalam mencegah lahirnya generasi yang lemah akibat kemiskinan, sekaligus mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pertama yaitu mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya, serta tujuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi merupakan tahap krusial yang menjembatani tujuan normatif kebijakan dengan praktik di lapangan, di mana berbagai persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data penerima, dan rendahnya pemahaman keluarga penerima manfaat mencerminkan masalah implementasi kebijakan

PKH, bukan sekadar kelemahan administratif (Pranata & Dewi, 2023). Dalam perspektif teori implementasi kebijakan, kegagalan atau ketidaksempurnaan pelaksanaan kebijakan tidak semata disebabkan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh hubungan antara tujuan kebijakan, kemampuan para pelaksana, karakteristik kelompok sasaran, serta kondisi sosial dan kelembagaan di tingkat lokal (Fauzan, 2024).

Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), persoalan seperti ketidaktepatan sasaran, keterbatasan data penerima manfaat, serta minimnya tingkat pemahaman keluarga penerima manfaat mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program menunjukkan bahwa tantangan utama PKH terletak pada tahap implementasi. Oleh karena itu, implementasi PKH perlu dipahami sebagai proses sosial dan kelembagaan yang kompleks, bukan sekadar aktivitas administratif penyaluran bantuan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa dampak Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat masih belum optimal. Bantuan yang diberikan cenderung bersifat jangka pendek karena lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pangan dan pengurangan pengeluaran, tanpa secara signifikan mendorong kemandirian ekonomi keluarga miskin (Fadhli et al., 2023). Kondisi ini sejalan dengan pandangan para pakar kebijakan

social yang menekankan bahwa program bantuan bersyarat cenderung menghasilkan dampak jangka pendek apabila tidak didukung oleh implementasi yang efektif, pendampingan yang berkualitas, serta integrasi dengan strategi pemberdayaan ekonomi yang lebih luas (Pancho et al., 2025).

Fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi PKH di tingkat kelurahan, yang tercermin dari persoalan ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta pemahaman penerima manfaat terhadap kewajiban program di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang, sehingga perlu dikaji secara lebih mendalam.

Secara empiris, Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang merupakan wilayah yang secara aktif melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kelurahan dengan melibatkan keluarga penerima manfaat dan pendamping program sebagai aktor utama implementasi kebijakan. Berdasarkan data Profil Kelurahan Durian Depun Tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebanyak 3.334 jiwa yang terdiri dari 1.695 laki-laki dan 1.639 perempuan, dengan total 986 kepala keluarga, serta terdapat sekitar 250 masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin. Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan masih menjadi isu nyata di tingkat lokal

yang memerlukan intervensi kebijakan yang efektif (Profil Kelurahan, 2025).

Berdasarkan data BNBA PKH Tahap IV Tahun 2025, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tercatat sebanyak 132 keluarga, yang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin menunjukkan bahwa cakupan penerima manfaat program masih terbatas. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara jumlah penduduk miskin dan penerima manfaat PKH (Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2025a).

Namun demikian, kesenjangan tersebut tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai kegagalan program, melainkan perlu dipahami dalam konteks karakteristik kebijakan PKH yang menggunakan mekanisme penargetan berbasis kriteria tertentu. Penetapan penerima manfaat PKH tidak ditujukan untuk seluruh penduduk miskin, melainkan berbasis pada kategori spesifik seperti ibu hamil, anak-anak usia sekolah, lanjut usia, dan kelompok masyarakat rentan lainnya, sehingga tidak semua rumah tangga miskin secara otomatis menjadi sasaran program. Dengan demikian, keterbatasan cakupan program tidak hanya dipengaruhi oleh potensi ketidaktepatan data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi juga merupakan konsekuensi dari desain kebijakan yang bersifat selektif, yang

dalam kajian kebijakan publik dikenal sebagai potensi *exclusion error* (Ningtiyas, 2018).

Indikasi permasalahan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat lokal juga ditemukan di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan hasil wawancara awal dengan pendamping PKH yang bertugas sejak tahun 2018, pelaksanaan pendampingan PKH di wilayah ini dilakukan secara intensif hampir setiap hari melalui berbagai kegiatan, seperti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), pendampingan layanan kesehatan di posyandu, serta pemantauan kehadiran anak penerima manfaat di sekolah (Pendamping PKH Kelurahan Durian Depun, 12 Februari 2026).

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat kehadiran sebagian keluarga penerima manfaat dalam kegiatan P2K2. Kondisi ini terutama dialami oleh KPM lansia, KPM yang bekerja, serta KPM dengan kondisi disabilitas tertentu yang menyulitkan pendamping dalam memastikan pemenuhan kewajiban program secara optimal (Pendamping PKH Kelurahan Durian Depun, 12 Februari 2026).

Temuan empiris ini menunjukkan bahwa tantangan implementasi PKH di tingkat kelurahan tidak semata-mata berhubungan dengan aspek teknis dan administratif, tetapi

juga dipengaruhi oleh variasi tingkat kepatuhan sebagian kelompok sasaran serta keterbatasan kapasitas pendamping dalam merespons dan mengelola dinamika sosial di tingkat lokal, sebagaimana ditekankan dalam pendekatan *bottom-up* yang menempatkan peran aktor pelaksana lokal sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Ayuni et al., 2025).

Selain kendala partisipasi, pendamping juga mengungkapkan adanya permasalahan administratif dan sosial dalam implementasi PKH, seperti konflik keluarga terkait kepemilikan kartu bantuan, kartu rusak atau terblokir, serta dinamika perubahan data kepesertaan yang menuntut verifikasi dan validasi lapangan secara berulang. Meskipun secara umum kepesertaan PKH di Kelurahan Durian Depun dinilai relatif tepat sasaran berdasarkan indikator kesejahteraan, pendamping menegaskan bahwa kesadaran KPM untuk melakukan graduasi mandiri masih tergolong rendah, di mana sekitar 90 persen KPM belum bersedia mengundurkan diri meskipun kondisi ekonomi mereka telah mengalami perbaikan (Pendamping PKH Kelurahan Durian Depun, 12 Februari 2026).

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa meskipun PKH telah berjalan secara administratif dan prosedural, implementasi program di tingkat kelurahan masih menghadapi tantangan pada aspek partisipasi KPM, kualitas

pemenuhan kewajiban, serta dinamika sosial yang menyertai pelaksanaan kebijakan bantuan sosial bersyarat. Kondisi inilah yang menguatkan perlunya kajian mendalam mengenai implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Durian Depun sebagai konteks lokal dalam mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Pendamping PKH Kelurahan Durian Depun, 12 Februari 2026).

Selain dari sisi pelaksana, indikasi persoalan implementasi juga tercermin dari pengalaman keluarga penerima manfaat. Berdasarkan wawancara awal dengan salah satu keluarga penerima manfaat PKH di Kelurahan Durian Depun, bantuan PKH dinilai membantu memenuhi kebutuhan dasar, namun sebagian penerima masih belum sepenuhnya memahami kewajiban program, khususnya terkait kehadiran dalam kegiatan P2K2 dan kepatuhan administrasi layanan pendidikan dan kesehatan (Keluarga Penerima Manfaat PKH, 12 Februari 2026). Temuan awal ini menguatkan bahwa tantangan implementasi PKH tidak hanya berasal dari aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan partisipasi kelompok sasaran.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan sosial di tingkat lokal kerap menghadapi tantangan serupa (Pranata & Dewi, 2023),

sehingga menjadikan Kelurahan Durian Depun sebagai konteks lokal yang relevan untuk dianalisis guna memahami bagaimana kebijakan PKH diimplementasikan serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya dalam mendukung pencapaian tujuan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara tujuan normatif Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan realitas implementasinya di tingkat lokal. Secara konseptual, PKH dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus mendukung terwujudnya *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama tujuan pertama, SDG 1 (*No Poverty*). Namun, penelitian evaluatif sebelumnya menunjukkan bahwa kajian PKH lebih banyak berfokus pada analisis dampak program, seperti peningkatan akses pendidikan melalui pemenuhan kewajiban wajib belajar dan pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin, sementara kajian yang menelaah proses implementasi kebijakan secara mendalam di tingkat lokal masih relatif terbatas (A. Wardani et al., 2025).

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri pada kajian implementasi kebijakan sosial dengan fokus pada level mikro, yaitu tingkat kelurahan, untuk menganalisis bagaimana tujuan normatif PKH diterjemahkan dalam praktik

serta bagaimana implementasi tersebut berkontribusi terhadap pencapaian tujuan SDGs secara operasional.

Implementasi yang efektif menjadi prasyarat utama agar bantuan sosial tidak sekadar bersifat distributif, tetapi mampu mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan jangka panjang keluarga miskin. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan menjadi hal yang penting untuk menilai sejauh mana tujuan normatif PKH dapat diterjemahkan secara operasional di tingkat lokal sesuai dengan karakteristik sosial dan kelembagaan wilayah sasaran (Tyfania et al., 2024). Dalam konteks ini, penelitian tidak dimaksudkan untuk mengukur capaian kuantitatif SDGs, melainkan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan PKH dan dinamika aktor lokal yang memengaruhi kontribusinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Apabila permasalahan dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) tidak ditangani secara tepat, maka efektivitas program dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan pengentasan kemiskinan, berpotensi mengalami penurunan. Ketidaktepatan sasaran, lemahnya pendampingan, serta rendahnya pemahaman penerima manfaat terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam program dapat menyebabkan bantuan sosial tidak berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang keluarga miskin

(Pranata & Dewi, 2023). Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko mempertahankan kerentanan sosial ekonomi rumah tangga miskin dan menghambat upaya pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal. Selain itu, implementasi program perlindungan sosial yang tidak efektif dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan (Salsabila et al., 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya mengkaji Program Keluarga Harapan (PKH) dalam skala regional dengan cakupan beberapa kabupaten atau wilayah, serta berfokus pada persepsi penerima manfaat dan pembaruan kebijakan program. Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada analisis mendalam terhadap implementasi PKH di tingkat lokal untuk melihat keterkaitannya dengan upaya pencapaian pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan (Sofianto et al., 2020). Penelitian Damayanti dan Stiawati (2025), misalnya, lebih banyak menelaah kontribusi PKH secara nasional dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi PKH dalam konteks SDGs dan dalam skala kelurahan masih sangat terbatas.

Dalam penelitian ini, kontribusi Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) tidak dipahami sebagai capaian

makro pembangunan, melainkan dianalisis melalui indikator-indikator implementasi kebijakan yang relevan dengan tujuan SDGs, khususnya SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas). Indikator tersebut tercermin dalam ketepatan sasaran penerima manfaat, kepatuhan keluarga penerima manfaat terhadap kewajiban pendidikan dan kesehatan, serta peran pendamping dan aktor lokal dalam memastikan keberlangsungan dan efektivitas manfaat program di tingkat kelurahan. Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai implementasi kebijakan perlindungan sosial pada level mikro, sementara secara kebijakan dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi implementasi PKH.

Berdasarkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik implementasi tersebut, serta terbatasnya kajian empiris yang menelaah keterkaitan PKH dan SDGs pada level kelurahan, penelitian berjudul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai Upaya Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) di Kelurahan Durian Depun Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang”** menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana implementasi PKH dijalankan di tingkat kelurahan, faktor-faktor yang

memengaruhinya, serta sejauh mana implementasi tersebut dapat dipahami sebagai upaya konkret dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ketepatan data penerima manfaat PKH masih belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi riil masyarakat, sehingga diperlukan pemutakhiran data yang lebih akurat guna memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima.
2. Pemahaman keluarga penerima manfaat (KPM) mengenai kewajiban program PKH belum merata, terutama terkait kewajiban pendidikan dan kesehatan yang menjadi syarat utama penerimaan bantuan.
3. Koordinasi antara pendamping PKH dan aparat kelurahan belum berjalan secara optimal, baik dalam proses pendataan, monitoring, maupun evaluasi pelaksanaan program.
4. Dampak PKH terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat belum terlihat secara optimal dalam konteks sosial ekonomi lokal.
5. Kontribusi implementasi PKH terhadap capaian SDGs khususnya SDG 1: Tanpa Kemiskinan belum diketahui

secara mendalam, sehingga hubungan antara pelaksanaan program dengan keberhasilan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa masih perlu dikaji lebih jauh.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah adalah upaya untuk menentukan ruang lingkup persoalan yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji permasalahan sebagai berikut.

1. Kajian difokuskan pada keterkaitan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan SDGs poin 1: Tanpa Kemiskinan, tanpa melibatkan indikator SDGs lainnya.
2. Analisis penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan PKH, termasuk faktor pendukung, kendala yang muncul di lapangan, serta bentuk pengaruh program terhadap kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat.
3. Wilayah penelitian dibatasi hanya pada Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang, sehingga seluruh temuan bersifat kontekstual sesuai karakteristik wilayah tersebut.
4. Pembahasan tidak mencakup capaian SDGs lain seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, maupun aspek non-ekonomi, mengingat fokus utama penelitian berada pada isu kemiskinan.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Durian Depun, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Durian Depun?
3. Bagaimana kontribusi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kelurahan Durian Depun?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Durian Depun , Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Durian Depun.
3. Untuk menganalisis kontribusi implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kelurahan Durian Depun.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yang mencakup aspek teoritis maupun praktis. Manfaat teoretis berkaitan dengan kontribusi penelitian dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan perlindungan sosial dan pembangunan berkelanjutan, sementara manfaat praktis memberikan dampak nyata dan langsung terhadap pelaksanaan proses pembelajaran.

1. Manfaat Teoretis

- a. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan perlindungan sosial, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), dalam konteks pembangunan berkelanjutan di level desa.
- b. Temuan penelitian dapat memperkuat pemahaman teoretis mengenai hubungan antara intervensi sosial berbasis bantuan bersyarat dan pencapaian SDGs poin 1: Tanpa Kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian dapat menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah kelurahan, pendamping PKH, dan Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan PKH, terutama pada aspek pendataan, koordinasi, pendampingan, dan evaluasi program.

- b. Informasi yang diperoleh dapat mendukung perumusan strategi pengentasan kemiskinan berbasis lokal yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kelurahan Durian Depun.
3. Manfaat Akademis
- a. Penelitian ini berpotensi menjadi rujukan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang ingin menelaah implementasi PKH, kebijakan sosial, maupun SDGs Desa pada konteks wilayah lain.
 - b. Temuan penelitian dapat menjadi dasar bagi pengembangan studi lanjutan dengan pendekatan, metode, atau fokus yang lebih mendalam terkait pengelolaan program perlindungan social.

